

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI DI DISTRIK KUARI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA)

Yunier Liwiya
Masje Silija Pangkey
Gustaf Budi Tampi

ABSTRACT: *Research Objectives To know the implementation of local government policies in poverty alleviation, in the District of Tolikara District of Papua Province*

Methods in this study using qualitative research methods To find gambaran about the survival of the poor in Kuari District. the qualitative analysis technique used is the analyst of intractive model. Technique of collecting data in this research is done by observation (observation), depth interview and documentation study

The results show that the implementation of local government can not run well if the policy standards and targets are vague and unmeasurable, in the implementation of the district government tolikara kuari district. people who are not yet aware of the importance of education and health, the problem of poverty seen from the perspective of food is a problem of food insecurity due to low purchasing power, uneven food availability, high dependence on tbsp and limited diversification of food.

Keywords: *Policy Implementation, Local Government and Poverty Alleviation*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pemerintah daerah banyak hal dari faktor kemiskinan dan salah satu contohnya ada karena malas untuk berusaha dan sengaja untuk dimiskinkan. Sama hal seperti di kabupaten yang lain kemiskinan menjadi pokok masalah padahal kalau dilihat dari kekayaan alam kita, negara Indonesia tidaklah pantas memiliki rakyat yang begitu banyak untuk menderita karena kemiskinan.

Seperti yang diatas akan kita bahas untuk seperti malas untuk berusaha, tidak ada orang yang sifatnya untuk berkata malas tapi memang tidak cocok untuk dijalankan pekerjaan yang mereka dapatkan, dimana didalam ini penyaluran hobby sangat tidak tersedia ruang untuk berkarya. Sehingga ada kata malas untuk jadi alasan padahal mereka hanya ingin berkarya namun tak dihargai.

Sebenarnya malas hanya ketidak cocokan untuk dijalani. Dimiskinkan, banyak masyarakat kita miskin bukan karena miskin dan bukan tidak mau berusaha. seperti halnya banyak orang bekerja siang dan malam tapi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka aja tidak cukup dimana mereka sangat mendapatkan upah yang renda dimana salah satu alasan perusahaan mengatakan

pendidikannya masih rendah. Maklum untuk melanjutkan pendidikan daerah ini masih sangat mahal bagaikan berlian yang dipajangkan untuk dijual. Jadi sama halnya kita masyarakat miskin tetap miskin dimana hanya bisa seorang berkebung atau budak para penguasanya.

Seandainya pendidikan dalam negeri ini begitu terbuka untuk masyarakat atau diberikan dengan cuma-cuma mungkin negeri ini tidak begitu rugi atau bangkrut, tapi malah memberi penghasilan yang begitu banyak untuk negeri ini dimana kalau rakyatnya bisa menikmati pendidikan yang bagus. Disisi lain pula kita bisa melihat bahwa kekayaan alam di daerah ini termasuk negara terkaya, namun banyak penduduknya yang miskin karena para penguasa hari ini memang hanya menuntut untuk memperkaya diri, keluarga, serta golongannya. Mereka tidak mau bahkan tidak akan membagi hartanya untuk orang lain kecuali segolongannya. Inilah yang saya sebut dari awal bahwa rasa tolong menolong diantara manusia sudah hilang. Banyak orang berfikir bahwa orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai rumah atau orang yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya itu dikarenakan mereka tidak mau bekerja, malas

bekerja atau bahkan ada yang berfikir bahwa mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi orang miskin.

Anggapan yang seperti inilah yang sering digelontorkan oleh orang kaya terhadap orang miskin, namun perlu kita melihat bahwa mereka yang tidak punya rumah, mereka yang miskin bukan karena mereka malas bekerja, atau mereka yang tinggal dipedalaman desa setiap pagi mereka berangkat kekebunnya hingga pulang sore hari namun mereka tetap tidak pernah kaya walaupun mereka sudah memaksakan seluruh tenaganya untuk bekerja tapi mereka tetap sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana bisa mereka memenuhi kebutuhan hidupnya kalau kebijakan pemerintah hari ini memang mengharuskan mereka tetap menjadi miskin, yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap menjadi orang miskin. Analisa penyebab kemiskinan perlu dilakukan sebelum melaksanakan program yang bersifat menanggulangi kemiskinan karena 2 hal yang harus diperhatikan apakah dia miskin karena malas atau karena memang tidak mencari sumber kehidupan.

Orang miskin sendiri telah banyak berbuat sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras sesuai kemampuan, tapi tetap saja mereka sulit keluar dari masalah kemiskinan yang menghimpit kehidupannya. Pertanyaannya, apa lagi yang harus dilakukan agar masalah kemiskinan cepat terulangi? Ada 3 hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Kedua, kepedulian pemerintah dan masyarakat non miskin. Ketiga, dukungan lingkungan/sumberdaya alam (SDA). Namun, yang paling mendasar adalah dari sisi kemanusiaannya.

Perlu dibangun suatu pandangan dasar bahwa yang paling berperan dalam menanggulangi kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri. Karena sejatinya, yang paling tahu dengan persoalan kemiskinan dan bagaimana cara menanggulangnya

kesehariannya dengan dinamika kemiskinan. Menanggulangi kemiskinan oleh orang miskin itu sendiri harus menjadi paradigma baru sebagai landasan berpikir bersama dengan mendudukan orang miskin sebagai subjek utama pelaku penanggulangan kemiskinan. Warga miskin harus memiliki semangat bahwa hanya sayalah yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, bukan orang lain.

Asumsi (mindset) tergantung pada orang lain serta menganggap terjadinya kemiskinan karena akan memperpanjang budaya kemiskinan dan menistakan harkat martabat sebagai manusia berdaya. Di sisi lain, pandangan-pandangan seperti orang miskin itu bodoh, pemalas, suka minta-minta, dan akan makin menenggelamkan posisi warga miskin ke dalam jurang ketidakberdayaan dan menyulitkan tumbuhnya semangat kebangkitan bagi warga miskin untuk mampu sendiri menanggulangi kemiskinan pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat miskin perlu terus dilakukan sampai pada terwujudnya kemandirian masyarakat miskin dalam menyelesaikan persoalan kehidupannya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin tidak hanya bertumpu pada peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumberdaya, namun harus disertai dengan perbaikan sikap, mental, dan perilaku (transformasi sosial) masyarakat miskin itu sendiri dari ketergantungan menuju ke arah kemandirian.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah sangat penting keberadaannya bagi kelangsungan hidup sebuah negara bangsa. Untuk memperoleh sumberdaya manusia yang unggul dibutuhkan suatu proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pendidikan semata, tetapi juga harus di dukung perannya oleh masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pemegang amanah tertingi dari UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan.

Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Bantuan Langsung Tunai Program Pengembangan Kecamatan Program Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kebijakan digulirkan sebagai wujud konkrit kepedulian dan komitmen pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Demikian pula dengan pemerintah kabupaten yang dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah daerah setempat yang memiliki hal dan kewenangan dalam pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Tolikara adalah dengan mengeluarkan kebijakan bagi sekolah negeri. Kebijakan pendidikan gratis yang dikeluarkan mulai tanggal 2 Januari 2007

diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan dan mewujudkan program wajib belajar sambil tahun. Sekolah negeri mendapatkan kebijakan gratis dimulai dari jenjang pendidikan SD SMP dan SMA pada jalur pendidikan formal .

Perlindungan beban masyarakat, meski ditentang sebagaimana besar fraksi di DPRD Pemkab tetap melaksanakan program pendidikan gratis, padahal ketiga program dijalankan sudah muncul masalah baru, para kepala sekolah dan guru, kebingungan saat mencairkan dana pendidikan. Pasalnya, mekanisme pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ), sangat rumit, sehingga banyak sekolah yang harus mencari utang untuk biaya pendidikan. Jadi implementasi kebijakan pemerintah daerah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi implementasi pemerintah daerah membuat kebijakn juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi samapi merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah Tercipta masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1994 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Program pembangunanyang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan pada dasarnya pembangunana yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan (Rintonga 2004). Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multimensi karena dalam masalah yang di hadapi bukan saja terbatas

pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik.

Maka tentang kemiskinan sangat beragam dari sekarang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu Fenomena *multiface* atau multidimensional kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial. Termasuk sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.

Pada konferensi PBB terkait pengembangan sosial, deklarasi copenhagen menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi yang ditandai oleh kehilangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi” kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan absolut: bila pendapatnya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitar Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Kemiskinan kultural: Pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan yang ditantai oleh keterbelakangan dan penanguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia pertama, banyak rumah tangga masyarakat berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, meningkat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan di antara daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia (Bank dunia 2017).

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat

kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang, tidak kecuali di Indonesia. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan mengacu kepada garis kemiskinan. Standar garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan

Papua merupakan daerah di kawasan Timur Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembangunan selama beberapa daerah, kebijakan hanya diterapkan yang memberi kewenangan sangat besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola akselerasi pembangunan daerahnya masing-masing. Program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah ini, sehingga masing-masing kabupaten/kota di Papua nantinya mampu berkedudukan sejajar dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Salah satu program yang secara khusus ditetapkan untuk dilaksanakan di Papua adalah Rencana Strategis Pembangunan Kampung dengan orientasi untuk membangun wilayah dan masyarakat setempat secara lebih intensif pada tingkat kampung.

Dengan ketertinggalan pembangunan daerah ini, kondisi kehidupan fisik dan non-fisik masyarakat kemiskinan di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua kurang memprihatinkan. Kondisi fisik menunjukkan sangat terbatasnya fasilitas dan infrastruktur publik, sedangkan kondisi non-fisik menunjukkan masih rendahnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat setempat. Kondisi pembangunan fisik yang sangat tidak memadai bahkan sangat tertinggal tersebut menunjukkan adanya fenomena yang

disebut kemiskinan struktural. Konsep kemiskinan ini bukan hanya mengacu pada pengertian ekonomi, melainkan juga mengacu pada aspek-aspek struktural di luar itu, seperti sosial-budaya. Selain masyarakat miskin di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Mengalami menderita karena kurangnya atau bahkan tidak adanya pelayanan publik seperti telepon, penerangan listrik, air bersih, transportasi angkutan umum, sarana kesehatan, pendidikan, kredit, dan lain-lain, serta kurangnya kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal, regional dan nasional.

Kondisi kemiskinan struktural semacam itu terjadi karena orang miskin sering terpinggirkan dan tidak berdaya dalam mempertahankan hak mereka ketika dilanggar dan dieksploitasi oleh golongan kaya dan berkuasa sehubungan dengan perlunya akselerasi pembangunan daerah di Papua, isu yang paling menonjol di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat setempat Papua adalah isu keterbelakangan dan kesenjangan wilayah serta pembangunan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat lokal di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Masyarakat mengalami keterbelakangan dan kesenjangan wilayah, baik fisik, seperti kurang mendukungnya jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana maupun non-fisik, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM, masih rendahnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan lemahnya institusi lokal. Sarana dan prasarana fisik yang kurang memadai menyebabkan terisolasinya banyak warga masyarakat Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua di daerah perkampungan pedalaman yang terpencil (75%) tidak mampu menikmati proses maupun hasil pembangunan daerah yang berkeadilan.

Pembangunan manusia maka UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Dari sekian banyak pilihan, ada

tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan. Pembangunan manusia dapat tercapai apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Peran serta pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagai sumber daya baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (pendapatan) serta aspek moralitas. Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antar daerah. Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia. Indonesia kini adalah negara dengan sistem demokrasi baru yang bersemangat, dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, dengan adanya keterbukaan sosial dan ruang bagi debat publik yang jauh lebih besar. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam pengentasan kemiskinan pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah

kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai merupakan usai penghapusan subsidi minyak tanah, dan program konversi bahan bakar gas, penerangan /lampu, infrakstruktur, air bersih. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Dengan mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, pemerintah daerah mempunyai Misi. Membangun Masyarakat kuari yang Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera dari misi tersebut maka jelas kebijakan pemerintah daerah itu adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien, dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dalam implementasinya itu belum maksimal karena dapat dilihat dari permasalahan yang ada di kuari tersebut yang angka kemiskinannya tidak ada perubahan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas. Dan kemudian tidak ada berupa bentuk evaluasi yang dilakukan pada tiap tahunnya untuk bagaimana dapat meningkatkan produktifitas kerja dalam pengentasan kemiskinan, sehingga proses pengentasan kemiskinan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menemukan gambaran tentang upaya bertahan hidup masyarakat miskin di Distrik Kuari disertai dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan dengan butir-butir fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Maka digunakan metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988). Dalam penelitian ini yang diamati adalah pekerjaan dari pada masyarakat miskin di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Papua ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah tersebut.

Lokasi penelitian

Penelitian ini diadakan di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara letaknya cukup jauh dari pusat Kabupaten namun kelemahan terjadi saat ini Distrik Kuari belum direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan. Rencana Meneliti tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Papua.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti yang di dampingi dalam observasi partisipasi, dari unsur informan dalam penelitian ini Distrik Kuari Dan menjadi 10 informan antara lain:

1. Kepala distrik : 1 orang
2. Sekretaris distrik: 1 orang
3. Pegawai distrik : 2 orang
4. Kepala suku : 3 orang
5. Masyarakat : 3 orang

Maka teknik mendapatkan informan dilakukan dengan menenjukan langsung diwawancara dan diberikan pedoman atau daftar pertanyaan ini dianggap dapat memberikan informasi yan dibutuhkan.

Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan Studi Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan apa yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara mendalam studi dokumentasi

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan ialah analisis model intraktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Rohidi dan Malyarto, 1992) dimana dalam model analisis ini terdapat tiga komponen yaitu, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyimpanan data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Kuari belajar dari pengalaman selama ini, kita menemukan bahwa kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan selama ini harus diubah. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa yang harus menjadi aktor utama untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran kemiskinan adalah masyarakat miskin itu sendiri, bukan pemerintah ataupun pihak lain. Untuk itu, masyarakat miskin harus ditingkatkan kemampuannya untuk kemudian diber

dayakan dan ditingkatkan kemandiriannya. Kenyataan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat justru memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh proyek seperti biasa. Pengalaman kebijakan penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa bila masyarakat miskin diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk menentukan arah yang mereka sukai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, maka masyarakat miskin akan bergiat bahkan tidak ragu-ragu untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut. Rasa kepemilikan terhadap program akan lebih kuat dan ada perasaan bahwa mereka dihargai untuk menentukan sendiri.

Pada prinsipnya, upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran harus mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, upaya mengembangkan kewirausahaan yang digerakkan melalui upaya pendampingan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan akses terhadap modal ekonomi/sumber daya kapital langsung kepada masyarakat. Melalui dukungan ketiga aspek ini secara memadai, maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat berhasil secara efektif. Dalam banyak kasus, kemiskinan selalu dipandang dari perspektif makro. Studi-studi kemiskinan pada umumnya lebih fokus pada aspek antara kebijakan makro dan kemiskinan, misalnya dampak subsidi BBM terhadap kemiskinan, dampak terhadap taraf hidup penduduk miskin. Kita juga tetap menyangsikan kesimpulan yang menyatakan bahwa kenaikan harga beras menjadi penyebab utama terjadinya pembengkakan jumlah penduduk miskin. Kita bahkan menuduh bahwa Bank Dunia telah melakukan simplifikasi yang berlebihan atas kompleksitas masalah kemiskinan. Mengandalkan studi makro memang seringkali tidak

memuaskan. Informasi yang dihasilkan hampir tidak pernah akurat dan valid. dan seterusnya. Akibatnya, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran, ketidakjelasan target, biasa ke orang nonmiskin, menjadi. Keunggulan studi ini adalah keakurasiannya dalam mengidentifikasi karakteristik penduduk miskin, sehingga pada gilirannya sangat memudahkan dalam implementasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan serta melakukan evaluasi atas kemajuan yang dicapai dalam berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Dengan studi mikro, para pengambil kebijakan tidak perlu lagi gagap setiap kali ditanya, dimana persisnya terjadi penurunan angka kemiskinan, apa yang menyebabkan penurunan tersebut, upaya-upaya apa yang signifikan mengurangi angka kemiskinan, bagaimana efektifitas kebijakan dan program yang diimplementasikan. Guna mengarahkan penelitian ini maka peneliti mempergunakan teori implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi sumber daya disposisi struktur birokrasi Komunikasi. Salah satu aspek yang cukup berperan dalam penerapan suatu kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan Distrik Kuari Kabupaten Tolikara adalah proses sosialisasi dari suatu program yang akan diterapkan, artinya suatu program penanggulangan kemiskinan, komunikasi sangat diperlukan terhadap target group sangat berperan sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu program kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui sosialisasi kepada masyarakat miskin sehingga program dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran.

Di samping itu, komunikasi juga merupakan kegiatan yang penting dalam proses kepemimpinan, sebab untuk menggerakkan atau mempengaruhi bawahan akan efektif jika dilakukan melalui komunikasi. Pada pelaksanaan sosialisasi program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Distrik Kuari dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi secara formal pada kelurahan, juga dilakukan oleh instansi atau

dinassosial demikian pula organisasi non pemerintah atau LSM banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terutama pada penduduk miskin. Berdasarkan aspek komunikasi dalam kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui sosialisasi program, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin untuk terlibat secara langsung sebagai salah satu wujud untuk mencapai tingkat keberhasilan suatu program kegiatan. Kemampuan berkomunikasi menjadi sangat diperlukan untuk menjamin agar pesan yang disampaikan tidak terjadi distorsi dan dapat dimengerti oleh masyarakat (target group). Disamping itu ada beberapa program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan melibatkan organisasi lain atau pendamping sebagai ujung tombak dalam penyampaian berbagai program Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mutlak diperlukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut.

Dalam perkembangan yang terjadi, menunjukkan bahwa konsepsi partisipasi masih cenderung diartikan secara salah kaprah. Atas nama partisipasi ataupun atas nama gotong royong, pemerintah seringkali meminta rakyat untuk ikut serta dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam aspek komunikasi berdasarkan hasil penelitian yang sangat perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam penerapan strategi penanggulangan kemiskinan di distrik kuari adalah kemampuan para instansi pelaksana program untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, karena selama ini banyak sekali program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dialokasikan pada pemerintah kelurahan dan kecamatan sehingga upaya untuk keberhasilan program tersebut sangat dibutuhkan system koordinasi antara berbagai instansi dalam memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan baik bahwa program tersebut ini yang berasal dari dinas sosial. Dari dinas atau

instansi dari dinas koperasi dan sebagainya. Sumber Daya Bagaimana unit kerja pemerintah agencies) mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan administrasi program yang meliputi sumber daya pembiayaan, sumber daya aparatur, dan sumber daya lingkungan dimana program tersebut dilaksanakan.

Kriteria perolehan sumber daya yang disebutkan itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil program. Artinya, penggalangan sumber daya harus menjamin tercapainya tujuan dan hasil program yang efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin. Dukungan sumber daya yang disebutkan itu tentu sulit didayagunakan secara efektif dan efisien, bila unit-unit kerja pemerintah tidak mampu menterjemahkan kebijakan dan program kedalam suatu sistem perencanaan kegiatan yang dapat mencapai sasaran secara tepat guna. Penerjemahan kebijakan dan program ke dalam kegiatan operasional inilah yang akan menentukan kinerja kebijakan dalam memberdayakan masyarakat miskin atau menurunkan jumlah penduduk miskin di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Papua.

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, integral dan komprehensif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan (Miles dan Huberman 1994). Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas obyek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, maka diperoleh suatu

analisis data yang terusmenerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Tolikara Distrik Kuari terdiri dari pegunungan. dilihat dari kultur mata pencaharian penduduk Kabupaten Tolikara meliputi, Pertanian, perdagangan, industry dan Pariwisata. Sumber penghasilan terbesar adalah hasil pertanian, ketergantungan dari pertanian dan nelayan biasanya masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi, hal ini mencerminkan bagaimana tingkat kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara Distrik Kuari. Masyarakat yang meliputi, pertanian dan perdagangan, ketiganya ada perbedaan dari sisi kehidupannya. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, Angka Partisipasi kasar (APK) bidang pendidikan dan Angka Pembangunan Manusia (APM), Masyarakat pertanian dan perdagangan jelas berbeda sehingga penanganan pengentasan kemiskinan juga berbeda.

Karakteristik Masyarakat Miskin Distrik Kuari Kabupaten Tolikara

Masalah kemiskinan distrik kuari bukan persoalan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan persoalan yang kompleks dari berbagai sector kehidupan. Untuk menggambarkan kompleksitas dan karakteristik problem kemiskinan distrik kuari Sebab kemiskinan di distrik kuari secara teoritik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pandangan konservatif dan pandangan modern. Pandangan konservatif mengatakan bahwa kemiskinan yang ada diakibatkan oleh nilai dan budaya, misalnya; malas, boros, cepat puas dan lain-lain. Sedangkan pandangan modern melihat kemiskinan yang ada disebabkan oleh adanya ketimpangan dari kepemilikan factor produksi yang rendah, Sumber Daya Manusia rendah, investasi minim, ketidaksempurnaan pasar dan lemahnya jiwa interpreneur. Pelaksanaan Program dan kegiatan penguatan ekonomi

produktif distrik kuari didominasi oleh APBN dan APBD Kabupaten, pemerintah kabupaten begitu besar perhatiannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan membangun usaha-usaha ekonomi produktif yang bersifat kecil dan menengah, sehingga basis-basis ekonomi di masyarakat dapat diperkuat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam mengalokasikan APBD pada setiap tahunnya sebagai berikut.

- a. Penguatan modal kerja bagi industri kecil dan rumah tangga, koperasi
- b. Penguatan Mutu Intensifikasi (PMI), dengan memberikan modal usaha tani untuk pembelian pupuk, bibit, benih dan lainnya bagi petani, peternak dan petani tambak.
- c. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil adalah penguatan modal untuk petani kecil, usaha pracangan, olahan hasil pertanian, penjual sayur dll (pemberian penguatan modal bagi petani kecil
- d. Peningkatan Ketahanan Pangan, yaitu dengan memberikan penguatan modal bagi desa dan pangan.
- e. Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yaitu dengan memberikan penguatan modal usaha tani khusus bagi petani

Didalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten telah menyusun dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan yaitu strategi dan rencana tindak penanggulangan kemiskinan adapun dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan diskusi, konsultasi, dan kajian lapangan secara partisipatif bersama kalangan masyarakat miskin dan berbagai pihak yang terkait dengan persoalan kemiskinan. Penyusunan dengan demikian didasarkan atas Analisis Kemiskinan secara partisipatif (AKP). Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara dimulai dengan

mekanisme perencanaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Toliara Distrik kuari beserta kelompok masyarakat yang peduli terhadap program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan publikasi program-program penanggulangan kemiskinan melalui :

1. Sosialisasi program mulai dari sosialisasi tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai RT / RW.
2. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan kerjasama Radio Suara Tolikara untuk talk show sosialisasi program-program kemiskinan secara, dan menghimpun permasalahan-permasalahan dari masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.
3. Publikasi program dan keberhasilan program juga dilakukan melalui media Tabloid Bulanan suara distrik kuari
4. Berdasarkan keputusan Bupati tentang pembentukan TKPKD dan Tugas serta masing-masing kelompok kerja, maka TKPKD secara operasional telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan sosialisasi terhadap program-program kemiskinan di Kabupaten Tolikara Distrik Kuari.
 - b. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara rutin pada setiap bulannya baik dengan seluruh anggota TKPKD maupun masing-masing pekerja dengan agenda pembahasan
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan program penanggulangan kemiskinan distrik kuari dengan mengajak seluruh anggota untuk memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan mengambil sampel pelaksanaan di desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk kelompok-kelompok sehingga pelaksanaannya bisa serentak.

- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kemiskinan distrik kuari dari berbagai sumber dana. Baik APBN, APBD Propinsi, maupun APBD Kabupaten.

- e. Realisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tolikara dikelompokkan dalam 3 pendekatan yaitu; Bantuan Langsung Tunai, Raskin, Bantuan Operasional Sekolah, dan asuransi Kesehatan.

Hasil Pengentasan Kemiskinan

Dalam kebijakan dan Strategi Penanggulangan kemiskinan Disitrik Kuari, sesuai dengan dokumen strategi dan rencana tindak penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui kebijakan :

- a. Menyediakan Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang digunakan adalah meliputi:
- b. Merumuskan kebijakan daerah bersama seluruh stakeholder tentang standart pelayanan minimal pendidikan dasar.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkualitas dan mudah diakses oleh semua usia anak sekolah.
- d. Membuka unit layanan pendidikan setingkat SMP/SMA, di desa Terpencil
- e. Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi keluarga miskin, adapun strategi yang digunakan adalah meliputi :
- f. Meningkatkan pelayanan jaminan asuransi kesehatan bagi keluarga miskin.
- g. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar baik di RSUD dan puskesmas, dan polindes
- h. Mengoptimalkan tindakan prevntif untuk mencegah penyebaran penyakit menular sejak dini melalui perbaikan.

Tanggapan masyarakat terhadap progam pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan mendapat tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang setuju dengan progam langsung karena langsung dapat dimanfaatkan

oleh keluarga miskin. Sedangkan difihak yang lain kurang setuju karena tidak mendidik dan banyak tidak tepat sasaran dan sering menimbulkan konflik. Guna mengatasi kedua pendapat yang berbeda tersebut masyarakat berpendapat sebaiknya program pengentasan kedepan itu sifatnya tidak langsung, masyarakat miskin usia produktif harus meraih program pengentasan kemiskinan lewat program, apakah dengan cara padat karya, melakukan usaha produktif dengan cara pinjaman modal. Menurut pendapat masyarakat distrik kuari sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah harga. Menurut faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga secara linier secara terus-menerus bahkan menurut kepala urusan kesejahteraan masyarakat, masyarakat lebih senang memilih harga stabil dibandingkan program pengentasan kemiskinan. Ini artinya aspirasi masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan tidak selamanya lewat program langsung tetapi lewat program tak langsung dengan cara perbaikan ekonomi makro dengan cara menstabilkan harga barang, menstabilkan nilai rupiah dan perbaikan nilai rupiah dengan hasil-hasil pertanian.

Dari berbagai data tersebut menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang selama ini dianggap tepat menurut pemerintah ternyata tidak tepat menurut masyarakat. Aspirasi yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan akan menyebabkan terjadinya pemborosan keuangan negara. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah program dan dana program pengentasan kemiskinan yang di berikan kepada masyarakat miskin ternyata tidak ada korelasi yang positif. Semakin besar dana yang diberikan pada program kemiskinan tidak diikuti menurunnya jumlah keluarga miskin.

Jadi aspirasi masyarakat miskin terhadap program pengentasan kemiskinan

adalah program yang tidak langsung yang diikuti program makro ekonomi yaitu menstabilkan harga, menstabilkan nilai rupiah dan menjaga nilai harga produk sektor pertanian. Menurut masyarakat Distrik Kuari mengatakan bahwa program tersebut sangat penting dilakukan pemerintah. Mereka berpendapat perbaikan ekonomi makro dan usaha sektor riil lebih dibutuhkan daripada bantuan langsung maupun tidak langsung yang akir-akhir ini semakin ditingkatkan jumlahnya. Oleh karena itu fasilitas di sektor riil atau swasta harus ditingkatkan karena yang paling banyak berperang pemerintah. Alam pembangunan ekonomi adalah kaum swasta bukan pemerintah. Dengan memperhatikan konsep-konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tolikara Distrik Kuari serta pendapat tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang di jaring oleh peneliti melalui kegiatan wawancara dan observasi, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa model strategi implementasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tolikara dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan dapat dipaparkan dalam bentuk hasil penelitian.

Jika begitu halnya maka ekonomi rakyat harus dikembangkan dalam rangka untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Ekonomi masyarakat distrik kuari, sesuai dengan ukurannya, diharapkan mampu menyelesaikan kedua masalah tersebut secara langsung. Cara ini lebih fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat Distrik Kuari. Responsivitas Pemerintah Distrik Kuari Kabupaten Tolikara dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kuari. Program apapun yang digulirkan oleh pemerintah pusat termasuk kebijakan tidak membutuhkan dukungan dari masyarakat sasaran kebijakan tapi yang lebih penting adalah bagaimana tingkat responsivitas pemerintah dan aparaturnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif ini tingkat responsivitas pemerintah dapat dilihat dari

daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat distrik kuari kabupaten tolikara, kemampuan aparat pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh tahapan. Berikut ini ditunjukkan konsistensi pemerintah distrik kuari dalam mendukung pelaksanaan khususnya dalam pengalokasian anggaran pada APBD sebagai dana sharing ataupun dana pendamping pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan di Distrik Kuari.

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang didukung oleh data dan dokumen yang relevan dapat ditegaskan bahwa responsivitas atau daya tanggap pemerintah Distrik Kuari Kabupaten Tolikara terhadap implementasi terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya distrik kuari komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana sharing melalui APBD Distrik Kuari setiap tahunnya, sebesar 20 persen dari total anggaran dari pemerintah pusat.

Keberterimaan Masyarakat terhadap Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Distrik Kuari masyarakat dapat dilihat melalui seberapa jauh pemahaman dan dukungan atau partisipasi masyarakat dalam program implementasi Distrik Kuari. Perspektif ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui, memahami dan mendukung. Serta berpartisipasi langsung terhadap pelaksanaan berbagai tahapan dan bentuk program dari kebijakan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang didukung oleh data yang relevan, dapat ditegaskan bahwa eksistensi dan peran masyarakat sebagai wujud keberterimaan masyarakat terhadap implementasi program ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pemahaman dan dukungan atau partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program kebijakan di kuari situasi inilah yang menjadikan bahwa

implementasi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan hakikat program dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Warga masyarakat di Distrik Kuari tidak lagi mengalami perlakuan diskriminatif dalam setiap pelaksanaan pembangunan sebagaimana terjadi sebelum terbentuknya Provinsi Papua adalah otonomi khusus. Artinya bahwa dalam setiap tahapan pembangunan komunitas masyarakat menjadi sasaran dan dapat secara langsung berpartisipasi dalam proses pembangunan. Falsafah hidup masyarakat adat dikuari, yakni "Adat istiadat sebagai dalam menjalankan aktivitas kehidupan bermasyarakat. Semangat kegotongroyongan masyarakat Kuari yang masih berlangsung dan senantiasa tetap mewarnai dinamika pelaksanaan program pembangunan, yang dalam bahasa daerah dikuari disebut "Yabu eruwok", artinya bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kebiasaan lain masyarakat dalam membangun desa/kelurahannya adalah apa yang disebut "Ambi me ekak", saling mengajak bermufakat, atau bermusyawarah dalam semangat kegotongroyongan membangun bersama untuk kepentingan masyarakat. Keadaan Penduduk Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Papua.

Secara etno biologis Penduduk Distrik Kuari merupakan suku bangsa yang memiliki pertalian etnis tersendiri dibandingkan dengan suku bangsa lainnya yang ada di papua. Letaknya berada dikuari, hidup di tengah keterasingan dan jauh dari kontak dengan kemajuan atau modernisasi. Kenyataan menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang kurang kondusif membuat masyarakat berada dalam tarap hidup yang cukup memprihatinkan. Pada saat ini sebagian besar masyarakat distrik kuari masih berbusana sederhana sebagai simbol keterbelakangan mereka, sebagian besar penduduk kuari masih primitif ibarat hidup di jaman batu, peramu (*nomad*). Mereka bermukim terpencar dan terpencil di lepas

gunung, lembah-lembah serta celah-celah gunung yang sulit di jangkau bahkan jauh dari pusat-pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Tolikara papua.

Kondisi sosial ekonomi mereka belum memprihatinkan yakni kondisi perumahan sangat darurat, hidup dalam honai/ tingkat inflasi dan harga barang dan jasa tertinggi sebagian besar dari mereka nyaris tanpa busana dan pola perekonomian subsisten. Selain itu tingkat pendidikan relatif rendah, angka buta huruf mencapai lebih dari 70%, tingkat kesehatan rendah dan gizi rawan, Angka Kematian Bayi Tertinggi di kuari, sampai saat ini hanya begiu-begitu saja tingkat Kemiskinan belum meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat di simpulkan bahwa masalah. Dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan adalah

1. Implementasi pemerintah daerah tidak dapat berjalan dengan baik jika standar dan sasaran kebijakan kabur dan tidak terukur, dalam pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten tolikara distrik kuari. Hal ini dapat diminimalisir dengan cara pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dan koordinasi dalam menentukan sasaran kebijakan, apabila pemerintah pusat dan daerah dapat bekerjasama adanya close system tidak menjadi kendala justru menjadikan kemiskinan yang benar-benar tepat sasaran dan tidak adanya intervensi dari pihak manapun. Sehingga jika dilihat dari indikator ini implementasi pengentasan dalam upaya kemiskinan di Kabupaten tolikara diastri kuari belum dapat berjalan efektif.
2. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung akan mempermudah suatu implementasi diterapkan dan mencapai tujuan, dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan Distrik Kuari Kabupaten

Tolikara Provinsi Papua Kondisi sosial, politik, dan ekonomi sangat mendukung yang terlihat dari segi sosial masyarakat distrik kuari yang belum sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, sehingga sangat cocok diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan sehingga mudah diaplikasikan di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Masalah kemiskinan dilihat dari perspektif pangan merupakan masalah rawan panganakibat rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, ketergantungan tinggi terhadap sdm dan terbatasnya diversifikasi pangan.
4. Upaya pengentasan kemiskinan-termasuk di dalamnya upaya mewujudkan katahanan pangan pada masyarakat miskin-dilakukan dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat petani agar mereka mengenali potensi dirinya sehingga mampu secara mandiri menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat menulis sampaikan adalah:

1. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pengentasa kemiskinan di Distrik kuari, tetapi justru masih memiliki kualitas yang rendah, hal tersebut terjadi karena terdapat implementasi tidak fokus dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga perlu adanya peraturan yang jelas untuk menindak implementasi agar pelaksanaan di distrik kuari dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Implementasi kebijakan di distrik kuari masih terkendala dengan pelaksanaan untuk itu sebaiknya pemerintah daerah distrik kuari segera memenuhi sarana dan prasarana agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala dari segi sarana dan prasarana.
3. Implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Distrik Kuarai Kabupaten Tolikara hubungan antar organisasi belum dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya koordinasi dan kerjasama baik antara pemerintah pusat dengan daerah maupun seluruh instansi di daerah Kabupaten Tolikara Distrik Kauri agar pengentasan kemiskinan lebih efektif dan efisien.
4. Kurangnya komitmen para implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, serta instansi terkait dalam menjalankan tugas dengan baik dan jujur, seperti masih terdapat implementor yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, sehingga perlu ada peraturan yang jelas dan tegas untuk menindak para implementor yang tidak taat administrasi agar tidak menghambat jalannya pelaksanaan. Selain itu perlunya pengawasan bagi implementor agar menjalankan tugas dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. University Press.
- Hamudy. J. M. 2008. *pengentasan Rakyat Miskin dan Pembangunan Manusia* Bandung: Program pascasarjana Fisip Unpad.
- Hanif N, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Jamiluddin M. R 2004. *Mengapa Kemiskinan di Indonesia Kenjadi Masalah*.<http://www.kompas.com/>. Cetak/0402/10.Ekonomi/ 847162. Httm.
- Sarlito, S.W, 1993. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Penerbit Bulan Purnama.
- Nasucha Chaici 2004. *Kebijakan Administrasi Publik: Teori dan peraktek*. Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, A.1995. H, *Kemiskinan dan Kesenjangan* Yogyakarta: di Indonesia Media
- Nasikun. 2001. *Isu dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.*'' diktat mata kuliah program magister adminitrasi publik.Yogyakarta.Universitas gadjjah mada.
- Nalar G. 2006. *Ekonomi.Masalah tidak teransparannya Garis Kemiskinan* BPS.<http://blogspot.com>. Garis. html.
- Nasution 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kulitatif*. Bandung: tersito.
- Ndraha, Taliziduhu. (1999). *Pengantar Teoei Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta Rieke Cipta:
- Reppley, F, G. P. *Implementation Dan Bureaucracy Cecond Edition*. Chicago, Illinois The Doersy Press.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar :
- Surianingrat, B. 1992. *Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan.:* Jakarta PT RINEKA CIPTA.
- Wahab A, 2001. *Publik.Pengantar Analisis Kebijakan* Malang: Universitas Press. Muahamadiyah
- Widja 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Hasli Bulat Dan Utuh* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sumber-sumber lain
- Bank dunia. 2006.' *Ikhtisar: Era Baru dalam pengentasan kemiskinan di indonesia.*'' *Gradasi Aksara*.

http://www.worldbank.or.id. diakses
Jakarta:
yang dimaksud orang miskin.' Unpublished
paper. Departemen Gizi masyarakat.
Fakultas. Ekologi Manusia. Institut
pertanian.